



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 100 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/Pmk.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;

30. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
31. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 13);
32. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran badan/dinas/Kantor selaku pengguna anggaran.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran badan/dinas/Kantor selaku pengguna anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan perubahan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBDP adalah rencana keuangan perubahan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.914.498.506.700 berkurang sebesar Rp.57.075.536.734 sehingga menjadi Rp.1.857.422.969.966 dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah:

1. semula	Rp.	1.770.384.770.339
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(69.023.185.057)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	1.701.361.585.282

b. belanja daerah:

1. semula	Rp.	1.869.498.506.700
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(42.575.536.734)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	1.826.922.969.966

c. pembiayaan daerah:

1. semula	Rp.	189.113.736.361
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.552.351.677)
Jumlah pembiayaan setelah perubahan.	Rp.	186.561.384.684
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	125.561.384.684
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0



#### Pasal 4

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah:

1. semula	Rp.	538.009.872.339
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(20.667.409.330)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	517.342.463.009

b. pendapatan transfer:

1. semula	Rp.	1.164.863.598.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(50.323.875.727)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.114.539.722.273

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah:

1. semula	Rp.	67.511.300.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.968.100.000
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	69.479.400.000

#### Pasal 5

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

a. pajak daerah:		
1. semula	Rp.	358.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	358.500.000.000
b. retribusi daerah:		
1. semula	Rp.	38.760.751.300
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	5.298.561.000
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	44.059.312.300
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan:		
1. semula	Rp.	35.240.482.703
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(21.061.586.258)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.	14.178.896.445
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:		
1. semula	Rp.	105.508.638.336
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.904.384.072)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	100.604.254.264

(2) pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat:

1. semula	Rp.	920.836.598.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(19.485.186.000)
Jumlah dana transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp.	901.351.412.000

b. pendapatan transfer antar daerah:

1. semula	Rp.	244.027.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(30.838.689.727)
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	213.188.310.273

(3) lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:

a. pendapatan hibah:

1. semula	Rp.	67.511.300.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.968.100.000
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	69.479.400.000

b. dana darurat:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0

Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0

#### Pasal 6

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. pajak hotel:

1. semula	Rp.	25.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	5.000.000.000)
Jumlah pajak hotel setelah perubahan	Rp.	20.000.000.000

b. pajak restoran:

1. semula	Rp.	72.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(26.500.000.000)
Jumlah pajak restoran setelah perubahan	Rp.	45.500.000.000

c. pajak hiburan:

1. semula	Rp.	24.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	21.000.000.000
Jumlah pajak hiburan setelah perubahan	Rp.	45.000.000.000

d. pajak reklame:

1. semula	Rp.	19.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(9.000.000.000)
Jumlah pajak reklame setelah perubahan	Rp.	10.000.000.000

e. pajak penerangan jalan:

1. semula	Rp.	75.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	15.000.000.000
Jumlah pajak penerangan jalan	Rp.	90.000.000.000

f. pajak parkir:

1. semula	Rp.	6.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak parkir setelah perubahan	Rp.	6.000.000.000

g. pajak sarang burung walet:

1. semula	Rp.	500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	500.000.000
Jumlah pajak sarang burung walet setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000

h. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan:

1. semula	Rp.	37.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	23.000.000.000

Jumlah pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan setelah perubahan Rp. 60.000.000.000

i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan:

1. semula Rp. 100.000.000.000

2. bertambah/(berkurang) Rp. (19.000.000.000)

Jumlah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setelah perubahan Rp. 81.000.000.000

Pasal 7

(1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a. pajak hotel:

1. semula Rp. 23.690.650.000

2. bertambah/(berkurang) Rp. (5.170.650.000)

Jumlah pajak hotel setelah perubahan Rp. 18.520.000.000

b. pajak motel:

1. semula Rp. 1.000.000

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah pajak motel setelah perubahan Rp. 1.000.000

c. pajak losmen:

1. semula Rp. 1.000.000

2. bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah pajak losmen setelah perubahan	Rp.	1.000.000
d. pajak gubug pariwisata:		
1. semula	Rp.	1.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah gubug pariwisata setelah perubahan	Rp.	1.000.000
e. pajak wisma pariwisata:		
1. semula	Rp.	1.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak wisma pariwisata setelah perubahan	Rp.	1.000.000
f. pajak pesanggrahan:		
1. semula	Rp.	1.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak pesanggrahan setelah perubahan	Rp.	1.000.000
g. pajak rumah penginapan dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	315.220.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	299.780.000
Jumlah pajak rumah penginapan dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	615.000.000
h. pajak rumah kos dan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh):		
1. semula	Rp.	989.130.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(129.130.000)

Jumlah pajak rumah kos dan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) setelah perubahan	Rp.	860.000.000
(2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:		
a. pajak restoran dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	44.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(20.133.000.000)
Jumlah pajak restoran dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	24.367.000.000
b. pajak rumah makan dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	24.137.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(7.537.000.000)
Jumlah pajak rumah makan dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	16.600.000.000
c. pajak kafetaria dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	1.000. 000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak kafetaria dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	1.000.000
d. pajak kantin dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	1.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak kantin dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	1.000.000



e. pajak warung dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	2.180.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	585.000.000
Jumlah warung dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	2.765.000.000

f. pajak bar dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	1.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak bar dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	1.000.000

g. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya:

1. semula	Rp.	1.180.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	585.000.000
Jumlah pajak jasa boga dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	1.765.000.000

(3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

a. pajak tontonan film:

1. semula	Rp.	8.740.0000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.964.000.000)
Jumlah pajak tontonan film setelah perubahan	Rp.	4.776.000.000

b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	23.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	20.000.000
Jumlah pajak rumah makan dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	43.000.000
c. pajak kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	1.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	1.000.000
d. pajak pameran dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	7.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(6.000.000)
Jumlah pajak pameran dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	1.000.000
e. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	9.150.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	17.850.000.000
Jumlah pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	27.000.000.000
f. pajak sirkus/akrobat/sulat dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	3.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0

Jumlah pajak sirkus/ acrobat/ sulat dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	3.000.000
g. pajak permainan biliard, bowling dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	26.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	500.000.000
Jumlah pajak permainan biliard, bowling dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	526.000.000
h. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	1.600.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	800.000.000
Jumlah pajak permainan biliard, bowling dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	2.400.000.000
i. pajak panti pijit, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran ( <i>fitness centre</i> ) dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	3.300.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	4.300.000.000
Jumlah pajak panti pijit, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran ( <i>fitness centre</i> ) setelah perubahan	Rp.	7.600.000.000
j. pajak pertandingan olah raga dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	1.150.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.500.000.000
Jumlah pajak pertandingan olah raga dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	2.650.000.000
(4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:		
a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron:		

1. semula	Rp.	15.700.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(7.200.000.000)
Jumlah pajak reklame papan / billboard / videotron / megatron setelah perubahan	Rp.	8.500.000.000
b. pajak reklame kain:		
1. semula	Rp.	2.700.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.700.000.000)
Jumlah pajak reklame kain setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000
c. pajak reklame melekat/stiker:		
1. semula	Rp.	100.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame melekat/ stiker setelah perubahan	Rp.	100.000
d. pajak reklame selebaran:		
1. semula	Rp.	100.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame selebaran setelah perubahan	Rp.	100.000
e. pajak reklame berjalan:		
1. semula	Rp.	210.500.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(10.000.000)
Jumlah pajak reklame berjalan setelah perubahan	Rp.	200.500.000
f. pajak reklame udara:		
1. semula	Rp.	100.000

2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame udara setelah perubahan	Rp.	100.000
g. pajak reklame apung:		
1. semula	Rp.	100.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame apung setelah perubahan	Rp.	100.000
h. pajak reklame suara:		
1. semula	Rp.	100.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah reklame suara setelah perubahan	Rp.	100.000
i. pajak reklame film/slide:		
1. semula	Rp.	89.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	122.000.000
Jumlah pajak reklame film/slide	Rp.	211.000.000
j. pajak reklame peragaan:		
1. semula	Rp.	300.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(212.000.000)
Jumlah pajak reklame peragaan setelah perubahan	Rp.	88.000.000

(5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas:

a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri:		
1. semula	Rp.	100.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri setelah perubahan	Rp.	100.000.000
b. pajak penerangan jalan sumber lain:		
1. semula	Rp.	74.900.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	15.000.000.000
Jumlah pajak penerangan jalan sumber lain setelah perubahan	Rp.	89.900.000.000
(6) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f terdiri atas:		
a. pajak parkir:		
1. semula	Rp.	6.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak parkir setelah perubahan	Rp.	6.000.000.000
(7) Anggaran pajak burung sarang walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g terdiri atas :		
a. pajak burung sarang walet:		
1. semula	Rp.	500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	500.000.000
Jumlah pajak burung sarang walet setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000

(8) Anggaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h terdiri atas:

a. PBBP2:

1. semula	Rp.	37.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	23.000.000.000
Jumlah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) setelah perubahan	Rp.	60.000.000.000

(9) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i terdiri atas:

a. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak:

1. semula	Rp.	90.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(11.000.000.000)
Jumlah pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak) setelah perubahan	Rp.	79.000.000.000

b. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru :

1. semula	Rp.	10.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.000.000.000)
Jumlah pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000

#### Pasal 8

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b terdiri atas :

a. retribusi jasa umum :

1. semula	Rp.	24.170.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	3.145.000.000
Jumlah retribusi jasa umum setelah perubahan	Rp.	27.315.000.000

b. retribusi jasa usaha :

1. semula	Rp.	6.590.751.300
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.653.429.000
Jumlah retribusi jasa usaha setelah perubahan	Rp.	8.244.180.300

c. retribusi perizinan tertentu:

1. semula	Rp.	8.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	500.132.000
Jumlah retribusi perizinan tertentu setelah perubahan	Rp.	8.500.132.000

Pasal 9

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf c terdiri atas :

a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (lembaga keuangan):

1. semula	Rp.	35.240.482.703
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(24.736.751.987)
Jumlah bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (lembaga keuangan) setelah perubahan	Rp.	10.503.730.716



b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (Bidang Air Minum):

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/ (berkurang)	Rp.	3.675.165.729
Jumlah bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (Bidang Air Minum) setelah perubahan	Rp.	3.675.165.729

#### Pasal 10

(3) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf d terdiri atas:

a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan:

1. semula	Rp.	150.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	12.338.000.000
Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan setelah perubahan	Rp.	12.488.000.000

b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan:

1. semula	Rp.	1.025.300.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.089.700.000

c. jasa giro:

1. semula	Rp.	4.865.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.865.000.000)
Jasa giro setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000

d. hasil pengelolaan dana bergulir:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Hasil pengelolaan dana bergulir yang tidak dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0

e. pendapatan bunga:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan bunga setelah perubahan	Rp.	0

f. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah setelah perubahan	Rp.	0

g. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain setelah perubahan	Rp.	0

h. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing:

1. semula	Rp.	0
-----------	-----	---

2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain setelah perubahan	Rp.	0
i. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan setelah perubahan	Rp.	0
j. pendapatan denda pajak daerah:		
1. semula	Rp.	5.995.632.999
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.337.231.030)
Pendapatan denda pajak daerah setelah perubahan	Rp.	3.658.401.969
k. pendapatan denda retribusi daerah:		
1. semula	Rp.	2.903.132.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.853.132.000)
Pendapatan denda retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	50.000.000
l. pendapatan hasil eksekusi atas Jaminan :		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan setelah perubahan	Rp.	0

m. pendapatan dari pengembalian:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan dari pengembalian setelah perubahan	Rp.	0

n. pendapatan BLUD:

1. semula	Rp.	90.569.573.337
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(10.526.721.042)
pendapatan BLUD setelah perubahan	Rp.	80.042.852.295

o. pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0

p. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir setelah perubahan	Rp.	0

q. pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (Inkracht) :

1. semula	Rp.	0
-----------	-----	---

2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir setelah perubahan	Rp.	0
r. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah:		
1. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	250.000.000
Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah setelah perubahan	Rp.	250.000.000

Pasal 11

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a terdiri atas:

a. dana perimbangan:

1. semula	Rp.	888.929.719.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(19.485.186.000)
Dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	869.444.533.000

b. dana insentif daerah:

1. semula	Rp.	31.906.879.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Dana insentif daerah setelah perubahan	Rp.	31.906.879.000

(2) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a terdiri atas:

a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH):

1. semula	Rp.	50.022.862.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) setelah perubahan	Rp.	50.022.862.000
b. dana transfer umum-dana alokasi umum:		
1. semula	Rp.	668.160.406.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(21.399.409.000)
Dana transfer umum-dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	646.760.997.000
c. dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) fisik:		
1. semula	Rp.	69.477.213.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.276.223.000
Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) fisik setelah perubahan	Rp.	70.753.436.000
d. dana transfer umum-dana alokasi khusus non fisik:		
1. semula	Rp.	101.269.238.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	638.000.000
Dana transfer umum-dana alokasi khusus non fisik hasil setelah perubahan	Rp.	101.907.238.000
(3) Anggaran dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf b terdiri atas:		
a. dana insentif daerah (DID):		
1. semula	Rp.	31.906.879.000

2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) setelah perubahan	Rp.	31.906.879.000
(4) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b terdiri atas:		
a. pendapatan bagi hasil pajak:		
1. semula	Rp.	244.027.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(33.638.689.727)
Pendapatan bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	210.388.310.273

#### Pasal 12

(1) Anggaran lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 huruf a terdiri atas:		
a. pendapatan hibah dari pemerintah pusat:		
1. semula	Rp.	67.511.300.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.968.100.000
Pendapatan hibah dari pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	69.479.400.000
(2) Anggaran lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 huruf c terdiri atas:		
a. lain – lain pendapatan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Lain lain pendapatan setelah perubahan	Rp.	0

#### Pasal 13

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a. belanja operasi:		
1. semula	Rp.	1.397.332.989.017
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(56.712.006.096)
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	1.340.620.982.921
b. belanja modal:		
1. semula	Rp.	422.162.692.683
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	31.501.473.940
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	453.664.166.623
c. belanja tidak terduga:		
1. semula	Rp.	50.002.825.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(17.365.004.578)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	32.637.820.422

#### Pasal 14

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai:		
1. semula	Rp.	767.185.474.671
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(58.426.018.897)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	708.759.455.774
b. belanja barang dan jasa:		



1. semula	Rp.	590.638.809.346
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	9.665.648.929
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	600.304.458.275
c. belanja bunga:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	0
d. belanja subsidi:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0
e. belanja hibah:		
1. semula	Rp.	29.789.861.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.950.792.000)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	24.839.069.000
f. belanja bantuan sosial:		
1. semula	Rp.	9.718.844.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.930.844.128)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 5.787.999.872

Pasal 15

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara:

1. semula Rp. 369.577.469.722

2. bertambah/(berkurang) Rp. (29.889.758.813)

Jumlah gaji dan tunjangan aparatur sipil negara setelah perubahan Rp. 339.687.710.909

b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara:

1. semula Rp. 214.086.726.633

2. bertambah/(berkurang) Rp. (37.226.427.486)

Jumlah tambahan penghasilan aparatur sipil negara setelah perubahan Rp. 176.860.299.147

c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara:

1. semula Rp. 116.190.775.265

2. bertambah/(berkurang) Rp. (10.486.380.587)

Jumlah tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara setelah perubahan Rp. 105.704.394.678

d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD:

1. semula	Rp.	26.146.566.530
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.953.433.470
e. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah:		
1. semula	Rp.	1.631.041.590
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(12.714.720)
Jumlah gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah setelah perubahan	Rp.	1.618.326.870
f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah/wakil kepala daerah:		
1. semula	Rp.	1.108.375.655
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah/wakil kepala daerah setelah perubahan	Rp.	1.108.375.655
g. belanja pegawai BOS:		
1. semula	Rp.	12.315.816.888
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	13.712.008.012
Jumlah belanja pegawai BOS setelah perubahan	Rp.	26.027.824.900
h. belanja pegawai BLUD :		
1. semula	Rp.	26.128.702.388
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	3.523.821.227

Jumlah belanja pegawai BLUD	Rp.	29.652.523.615
-----------------------------	-----	----------------

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:

a. belanja barang:

1. semula	Rp.	160.957.263.173
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	3.215.514.354
Jumlah belanja barang setelah perubahan	Rp.	164.172.777.527

b. belanja jasa:

1. semula	Rp.	269.797.004.070
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.722.018.948)
Jumlah belanja jasa setelah perubahan	Rp.	268.074.985.122

c. belanja pemeliharaan:

1. semula	Rp.	58.377.564.380
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	2.593.567.250
Jumlah belanja pemeliharaan setelah perubahan	Rp.	60.971.131.630

d. belanja perjalanan dinas:

1. semula	Rp.	28.689.151.723
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(7.715.622.428)

Jumlah belanja perjalanan dinas setelah perubahan Rp. 20.973.529.295

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat:

1. semula Rp. 5.174.478.878

2. bertambah/(berkurang) Rp. 1.399.175.467

Jumlah belanja uang dan/atau jasa setelah perubahan Rp. 6.573.654.345

f. belanja barang dan jasa BOS:

1. semula Rp. 37.410.523.883

2. bertambah/(berkurang) Rp. (10.470.760.719)

Jumlah belanja barang dan jasa BOS setelah perubahan Rp. 26.939.763.164

g. belanja barang dan jasa BLUD:

1. semula Rp. 30.232.823.239

2. bertambah/(berkurang) Rp. 22.365.793.953

Jumlah belanja barang dan jasa BLUD setelah perubahan Rp. 52.598.617.192

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e terdiri atas:

a. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya:

1. semula Rp. 579.000.000

2. bertambah/(berkurang) Rp. 2.604.000

Jumlah belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	581.604.000
b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia:		
1. semula	Rp.	25.896.271.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.953.396.000)
Jumlah belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum setelah perubahan	Rp.	20.942.875.000
c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik:		
1. semula	Rp.	3.314.590.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik setelah perubahan	Rp.	3.314.590.000
(4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f terdiri atas:		
a. belanja bantuan sosial kepada individu:		
1. semula	Rp.	5.863.844.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.305.844.128)
Jumlah belanja bantuan sosial kepada Individu setelah perubahan	Rp.	3.557.999.872
b. belanja bantuan sosial kepada Keluarga :		

1. semula	Rp.	3.855.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.625.000.000)
Jumlah belanja bantuan sosial kepada keluarga setelah perubahan	Rp.	2.230.000.000

#### Pasal 16

(1) Anggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 huruf a terdiri atas:

a. belanja gaji pokok PNS:

1. semula	Rp.	277.753.739.646
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(22.763.118.028)
Jumlah belanja gaji pokok aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	254.990.621.618

b. belanja gaji pokok PPPK:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/ (berkurang)	Rp.	398.627.200

Jumlah belanja gaji pokok PPPK setelah perubahan	Rp.	398.627.200
c. belanja tunjangan keluarga PNS:		
1. semula	Rp.	24.099.948.453
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.936.593.578)
Jumlah belanja tunjangan keluarga ASN setelah perubahan	Rp.	21.163.354.875
d. belanja tunjangan keluarga PPPK:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/ (berkurang)	Rp.	43.307.800
Jumlah belanja tunjangan keluarga PPPK setelah perubahan	Rp.	43.307.800
e. belanja tunjangan jabatan PNS:		
1. semula	Rp.	6.550.090.119
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(397.733.542)
Jumlah tunjangan jabatan ASN setelah perubahan	Rp.	6.152.956.577
f. belanja tunjangan fungsional PNS:		
1. semula	Rp.	16.591.099.435
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.641.519.654)



Jumlah tunjangan fungsional ASN setelah perubahan	Rp.	14.949.579.781
g. belanja tunjangan fungsional umum PNS:		
1. semula	Rp.	5.461.762.804
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(797.600.198)
Jumlah tunjangan fungsional umum ASN setelah perubahan	Rp.	4.664.162.606
h. belanja tunjangan beras PNS:		
1. semula	Rp.	13.430.439.089
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(133.072.183)
Jumlah belanja tunjangan beras aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	13.297.366.906
i. belanja tunjangan beras PPPK:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	32.444.160
Jumlah belanja tunjangan beras PPPK setelah perubahan	Rp.	32.444.160
j. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN:		
1. semula	Rp.	2.704.378.595
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(749.322.072)
Jumlah belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus PNS setelah perubahan	Rp.	1.955.056.523

k. belanja pembulatan gaji PNS:

1. semula	Rp.	7.240.533
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(723.644)
Jumlah belanja pembulatan gaji setelah perubahan	Rp.	6.516.889

l. belanja pembulatan gaji PPPK:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	17.056
Jumlah belanja pembulatan gaji PPPK setelah perubahan	Rp.	17.056

m. belanja iuran jaminan kesehatan PNS:

1. semula	Rp.	20.622.849.550
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(743.614.587)
Jumlah iuran jaminan kesehatan ASN setelah perubahan	Rp.	19.879.234.963

n. belanja iuran jaminan kesehatan PPPK:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	14.736.309
Jumlah iuran jaminan kesehatan PPPK setelah perubahan	Rp.	14.736.309

o. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS:

1. semula	Rp.	602.268.565
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(51.913.227)
Jumlah iuran jaminan kecelakaan kerja ASN setelah perubahan	Rp.	550.355.338

p. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	781.883
Jumlah iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK setelah perubahan	Rp.	781.883

q. belanja iuran jaminan kematian PNS:

1. semula	Rp.	1.753.052.933
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(166.791.012)
Jumlah belanja iuran jaminan kematian ASN setelah perubahan	Rp.	1.586.261.921

r. belanja iuran jaminan kematian PPPK:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	2.345.560
Jumlah belanja iuran jaminan kematian PPPK setelah perubahan	Rp.	2.345.560

(2) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 huruf b terdiri atas:

a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS:

1. semula	Rp.	93.464.688.377
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(21.035.406.770)
Jumlah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS setelah perubahan	Rp.	72.429.281.607

b. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	15.000.000
Jumlah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK setelah perubahan	Rp.	15.000.000

c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS:

1. semula	Rp.	2.846.406.889
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	629.221.005
Jumlah tambahan penghasilann berdasarkan kondisi kerja setelah perubahan	Rp.	3.475.627.894

d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS:

1. semula	Rp.	265.609.377
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	143.775.197

Jumlah tambahan penghasilann berdasarkan kelangkaan profesi ASN setelah perubahan	Rp.	409.384.574
e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS:		
1. semula	Rp.	117.510.021.990
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(16.994.016.918)
Jumlah tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN setelah perubahan	Rp.	100.516.005.072
f. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	15.000.000
Jumlah tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK setelah perubahan	Rp.	15.000.000
(3) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektifitas lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 huruf c terdiri atas:		
a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah:		
1. semula	Rp.	10.570.773.906
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.866.010.286)
Jumlah belanja insentif ASN atas pemungutan pajak daerah setelah perubahan	Rp.	8.704.763.620
b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah:		
1. semula	Rp.	1.943.551.747
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	196.138.253
Jumlah belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	2.139.690.000

c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD:

1. semula	Rp.	69.709.851.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	3.443.900.150
Jumlah belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD setelah perubahan	Rp.	73.153.751.150

d. belanja tambahan penghasilan (tamsil) Guru PNSD:

1. semula	Rp.	789.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	734.000.500
Jumlah belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	1.523.000.500

e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN:

1. semula	Rp.	9.384.589.980
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.257.124.980)
Jumlah belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN setelah perubahan	Rp.	1.127.465.000

f. belanja honorarium:

1. semula	Rp.	22.722.108.632
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.738.284.224)

Jumlah belanja honorarium setelah perubahan	Rp.	17.983.824.408
g. belanja jasa pengelolaan BMD:		
1. semula	Rp.	1.070.900.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.000.000
Jumlah jasa pengelolaan BMD setelah perubahan	Rp.	1.071.900.000
(4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 huruf d terdiri atas:		
a. belanja uang representasi DPRD:		
1. semula	Rp.	1.004.010.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	28.433.470
Jumlah belanja uang representasi DPRD setelah perubahan	Rp.	1.032.443.470
b. belanja tunjangan keluarga DPRD:		
1. semula	Rp.	133.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah tunjangan keluarga DPRD setelah perubahan	Rp.	133.000.000
c. belanja tunjangan beras DPRD:		
1. semula	Rp.	142.348.800

2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan beras DPRD setelah perubahan	Rp.	142.348.800
d. belanja uang paket DPRD:		
1. semula	Rp.	86.058.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja uang paket DPRD setelah perubahan	Rp.	86.058.000
e. belanja tunjangan jabatan DPRD:		
1. semula	Rp.	1.455.814.500
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan jabatan DPRD setelah perubahan	Rp.	1.455.814.500
f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD:		
1. semula	Rp.	121.860.900
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja honorarium setelah perubahan	Rp.	121.860.900
g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD:		
1. semula	Rp.	14.433.300
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0



Jumlah jasa pengelolaan BMD setelah perubahan	Rp.	14.433.300
h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD:		
1. semula	Rp.	7.938.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD setelah perubahan	Rp.	7.938.000.000
i. belanja tunjangan reses DPRD:		
1. semula	Rp.	1.984.500.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah tunjangan reses DPRD setelah perubahan	Rp.	1.984.500.000
j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD:		
1. semula	Rp.	451.664.262
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja belanja pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah perubahan	Rp.	451.664.262
k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD:		
1. semula	Rp.	7.771.476.768
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	744.500.000

Jumlah belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD setelah perubahan	Rp.	8.515.976.768
1. belanja tunjangan transportasi DPRD:		
1. semula	Rp.	5.018.400.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.180.500.000
Jumlah belanja tunjangan transportasi DPRD setelah perubahan	Rp.	6.198.900.000
m. belanja uang jasa pengabdian DPRD:		
1. semula	Rp.	25.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja uang jasa pengabdian DPRD setelah perubahan	Rp.	25.000.000
(5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 huruf e terdiri atas:		
a. belanja gaji pokok KDH/WKDH:		
1. semula	Rp.	58.500.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.802.500)
Jumlah gaji pokok KDH/WKDH setelah perubahan	Rp.	54.697.500
b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH:		
1. semula	Rp.	8.190.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(532.350)

Jumlah tunjangan keluarga KDH/WKDH setelah perubahan	Rp.	7.657.650
c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH:		
1. semula	Rp.	105.300.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(6.844.500)
Jumlah belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH setelah perubahan	Rp.	98.455.500
d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH:		
1. semula	Rp.	579.360
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	6.372.960
Jumlah belanja tunjangan beras KDH/WKDH setelah perubahan	Rp.	6.952.320
e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH:		
1. semula	Rp.	3.360.883
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.860.883)
Jumlah belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH setelah perubahan	Rp.	1.500.000
f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH:		
1. semula	Rp.	1.200
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	3.800
Jumlah belanja pembulatan gaji KDH/WKDH setelah perubahan	Rp.	5.000

g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH:

1. semula	Rp.	6.897.600
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(879.600)
Jumlah iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH setelah perubahan	Rp.	6.000.000

h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH:

1. semula	Rp.	140.400
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(20.400)
Jumlah belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD setelah perubahan	Rp.	120.000

i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	350.000
Jumlah iuran jaminan kematian KDH/WKDH setelah perubahan	Rp.	350.000

j. belanja insentif bagi KDh/WKDH atas pemungutan pajak daerah:

1. semula	Rp.	1.335.090.147
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	62.498.753
Jumlah belanja insentif bagi KDh/WKDH atas pemungutan pajak daerah setelah perubahan	Rp.	1.397.588.900

k. belanja insentif bagi KDh/WKDH atas pemungutan retribusi daerah:		
1. semula	Rp.	113.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(68.000.000)
Jumlah belanja insentif bagi KDh/WKDH atas pemungutan retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	45.000.000
(6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 huruf f terdiri atas:		
a. belanja dana operasional DPRD:		
1. semula	Rp.	393.120.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah dana operasional DPRD setelah perubahan	Rp.	393.120.000
b. belanja dana operasional KDH/WKDH:		
1. semula	Rp.	715.255.655
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja dana operasional KDH/WKDH setelah perubahan	Rp.	715.255.655
(7) Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 huruf g terdiri atas:		
a. belanja pegawai BOS:		
1. semula	Rp.	12.315.816.888
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	13.712.008.012
Jumlah pegawai BOS setelah perubahan	Rp.	26.027.824.900
(8) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 huruf h terdiri atas:		

a. belanja pegawai BLUD:

1. semula	Rp.	26.128.702.388
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	3.523.821.227
Jumlah pegawai BLUD setelah perubahan	Rp.	29.652.523.615

Pasal 17

Belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b terdiri atas :

a. belanja modal tanah:

1. semula	Rp.	46.466.407.819
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(15.449.611.963)
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	31.016.795.856

b. belanja modal peralatan dan mesin:

1. semula	Rp.	39.609.293.811
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(7.086.941.290)
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	32.522.352.521

c. belanja modal gedung dan bangunan:

1. semula	Rp.	150.965.286.058
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.391.358.773)
Jumlah belanja modal modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	145.573.927.285

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:

1. semula	Rp.	184.193.063.501
-----------	-----	-----------------

2. bertambah/(berkurang)	Rp.	58.936.019.016
Jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah perubahan	Rp.	243.129.082.517
e. belanja modal aset tetap lainnya:		
1. semula	Rp.	914.641.494
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	507.366.950
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	1.422.008.444
f. belanja modal aset lainnya:		
1. semula	Rp.	14.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(14.000.000)
Jumlah belanja aset lainnya setelah perubahan	Rp.	0

#### Pasal 18

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c terdiri atas:

a. belanja tidak terduga:		
a. semula	Rp.	50.002.825.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	(17.365.004.578)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	32.637.820.422

#### Pasal 19

Belanja transfer sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf d terdiri atas:

a. belanja bagi hasil:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	0
b. belanja bantuan keuangan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	0

#### Pasal 20

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan:

1. semula	Rp.	144.113.736.361
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	11.947.648.323
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	156.061.384.684

b. pengeluaran pembiayaan:

1. semula	Rp.	45.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(14.500.000.000)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	30.500.000.000

#### Pasal 21

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1. semula	Rp.	144.063.736.361
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(108.052.351.677)
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	36.011.384.684



b. pencairan dana cadangan:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0

d. penerimaan pinjaman daerah:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah penerimaan pinjaman daerah	Rp.	0

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah:

1. semula	Rp.	50.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	50.000.000

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. semula	Rp.	0
-----------	-----	---

2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas:		
a. pembentukan dana cadangan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0
b. penyertaan modal daerah:		
1. semula	Rp.	45.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(14.500.000.000)
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	30.500.000.000
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	0
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0

e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp.	0

#### Pasal 23

(1) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah:		
1. semula	Rp.	45.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(14.500.000.000)
Jumlah penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah setelah perubahan	Rp.	30.500.000.000

#### Pasal 24

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (125.561.384.684);

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 125.561.384.684.

#### Pasal 25

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil -Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 29 September 2021

WALIKOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 29 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA KOTA PONTIANAK  
 NOMOR 100 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 86 TAHUN 2020  
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
 RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI  
 MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK  
 PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.770.384.770.339	1.701.361.585.282	(69.023.185.057)	(4)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	538.009.872.339	517.342.463.009	(20.667.409.330)	(4)
4.1.01	Pajak Daerah	358.500.000.000	358.500.000.000	0	0
4.1.02	Retribusi Daerah	38.760.751.300	44.059.312.300	5.298.561.000	14
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.240.482.703	14.178.896.445	(21.061.586.258)	(60)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	105.508.638.336	100.604.254.264	(4.904.384.072)	(5)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.164.863.598.000	1.114.539.722.273	(50.323.875.727)	(4)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	920.836.598.000	901.351.412.000	(19.485.186.000)	(2)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	244.027.000.000	213.188.310.273	(30.838.689.727)	(13)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	67.511.300.000	69.479.400.000	1.968.100.000	3
4.3.01	Pendapatan Hibah	67.511.300.000	69.479.400.000	1.968.100.000	3
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	1.770.384.770.339	1.701.361.585.282	(69.023.185.057)	(4)
5	BELANJA DAERAH	1.869.498.506.700	1.826.922.969.965	(42.575.536.735)	(2)
5.1	BELANJA OPERASI	1.397.332.989.017	1.340.620.982.921	(56.712.006.096)	(4)
5.1.01	Belanja Pegawai	767.185.474.671	708.759.455.774	(58.426.018.897)	(8)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.638.809.346	600.304.458.275	9.665.648.929	2

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
5.1.03	Belanja Bunga	0	930.000.000	930.000.000	0
5.1.05	Belanja Hibah	29.789.861.000	24.839.069.000	(4.950.792.000)	(17)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.718.844.000	5.787.999.872	(3.930.844.128)	(40)
5.2	BELANJA MODAL	422.162.692.683	453.664.166.622	31.501.473.939	7
5.2.01	Belanja Modal Tanah	46.466.407.819	31.016.795.856	(15.449.611.963)	(33)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.609.293.811	32.522.352.521	(7.086.941.290)	(18)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.965.286.058	145.573.927.284	(5.391.358.774)	(4)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	184.193.063.501	243.129.082.517	58.936.019.016	32
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	914.641.494	1.422.008.444	507.366.950	55
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	14.000.000	0	(14.000.000)	(100)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.002.825.000	32.637.820.422	(17.365.004.578)	(35)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.002.825.000	32.637.820.422	(17.365.004.578)	(35)
	Jumlah Belanja	1.869.498.506.700	1.826.922.969.965	(42.575.536.735)	(2)
	Surplus/Defisit	(99.113.736.361)	(125.561.384.684)	(26.447.648.323)	27
6	Pembiayaan	189.113.736.361	186.561.384.684	(2.552.351.677)	(1)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	144.113.736.361	156.061.384.684	11.947.648.323	8
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	144.063.736.361	36.011.384.684	(108.052.351.677)	(75)
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	120.000.000.000	120.000.000.000	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000	50.000.000	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	144.113.736.361	156.061.384.684	11.947.648.323	8
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000	30.500.000.000	(14.500.000.000)	(32)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	45.000.000.000	30.500.000.000	(14.500.000.000)	(32)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000.000	30.500.000.000	(14.500.000.000)	(32)
	Pembiayaan Netto	99.113.736.361	125.561.384.684	26.447.648.323	27
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	0	(0)	0

WALI KOTA PONTIANAK

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of connected loops and a final horizontal stroke.

EDI RUSDI KAMTONO